

Keputusan Arab Saudi Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Tahun 2013

Pinky Shafira

ABSTRAK

Salah satu kebijakan luar negeri Arab Saudi yang utama adalah untuk meminimalisir konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dengan dasar kebijakan tersebut, Arab Saudi mendaftarkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2014-2015. Akan tetapi, hanya beberapa jam setelah Arab Saudi dinyatakan berhasil mendapatkan jabatan tersebut, Arab Saudi mengundurkan diri dari jabatan tersebut dengan alasan kurang efektifnya PBB dalam mengatasi konflik yang ada di Timur Tengah. Dari fenomena tersebut, penelitian dilakukan untuk mencari faktor yang mendasari keputusan Arab Saudi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, keputusan Arab Saudi didasari oleh dua faktor, yaitu domestic environment dimana peran agama yang kuat di pemerintahan memunculkan isu sektarianisme yang kemudian mempengaruhi international environment yaitu hubungan Arab Saudi dengan negara lain. Hubungan antarnegara tersebut yang lantas menjelaskan kebijakan Arab Saudi untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya.

Kata-kata Kunci: Arab Saudi, Dewan Keamanan PBB, sektarianisme, domestic environment, international environment

Saudi Arabia has a foreign policy which they commit to become the part of a mediator of conflicts between the countries in the Middle East. Based on that policy, Saudi Arabia then registered as a non-permanent member for United Nation Security Council (UNSC) in 2014-2015. However, only few hours after being certified as a member of UNSC, Saudi Arabia rejected the seat due to UNSC less effectiveness to resolve the conflicts between the countries in the Middle East. This research aims to find out the factors which led Saudi Arabia to cancel the seat. The result of this research shows that Saudi Arabia's decisions were based on two factors which are domestic environment where the role of religion within the government was quite strong. It prompted sectarianism issue which led to the international environment, a relation between Saudi Arabia and other countries. The relation between those countries then matters to explain the irrational side of Saudi Arabia decision which is based on the rational factors.

Keywords: Saudi Arabia, United Nation Security Council, sectarianism, domestic environment, international environment

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Untuk memperluas pengaruhnya, negara tersebut menerapkan beberapa kebijakan dan salah satunya adalah mendaftarkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2014-2015. Hal tersebut dilakukan atas dasar mewujudkan keinginan Arab Saudi untuk lebih terbuka dan tegas terhadap posisinya dalam perang sipil Suriah maupun konflik Arab-Israel (Worth, 2013). Pada 17 Oktober 2013, Arab Saudi berhasil mendapatkan 176 dari 191 suara pada pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk periode 2014-2015. Namun hanya berselang beberapa jam setelah keputusan tersebut, Arab Saudi melalui Menteri Luar Negeri Saud Al Faisal menyatakan bahwa negara tersebut mengundurkan diri dari keanggotaannya dalam pemilihan (Worth, 2013). Arab Saudi menilai bahwa metode, mekanisme kerja, serta standar ganda yang ada di Dewan Keamanan menghambat badan tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga perdamaian dunia. Saud Al Faisal secara spesifik menyebutkan bahwa kegagalan tersebut berpengaruh terhadap terus berlangsungnya perang sipil di Suriah dan konflik Israel-Palestina. Selain itu, anggota tetap Dewan Keamanan pun dinilai hipokrit dalam menanggapi resolusi permasalahan di Timur Tengah, terlihat dari bagaimana negara anggota tetap menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang berkaitan dengan Suriah dan Israel (MEPC, 2013). Oleh karena itu, Arab Saudi secara formal menyatakan pengunduran dirinya pada 12 November 2013 diwakili oleh Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdullah Y. Al-Mouallimi (UN, 2013).

Keputusan Arab Saudi untuk mengundurkan diri tersebut dapat dilihat melalui dua faktor, yaitu faktor lingkungan internasional dan faktor lingkungan domestik. Lingkungan internasional memiliki pengaruh besar pada perumusan kebijakan luar negeri karena sistem internasional terbentuk atas interaksi antarnegara yang ada di dalamnya, dimana jika terjadi sesuatu di salah satu negara dalam sistem tersebut, hal itu akan berpengaruh terhadap negara lain di sistem yang sama. Sedangkan lingkungan domestik adalah aspek-aspek yang ada di dalam negara yang mempengaruhi aktor untuk membuat kebijakan. Kebijakan itu sendiri yang lantas digunakan aktor untuk memperkuat posisinya di lingkungan domestik (Hagan, 1993:4).

Faktor Lingkungan Internasional

Arab Uprising dan Konflik Suriah

Faktor lingkungan internasional yang mendasari kebijakan Arab Saudi diawali oleh terjadinya *Arab Uprising*, yaitu suatu gerakan anti pemerintah yang terjadi di kawasan Timur

Tengah yang dimulai sejak tahun 2010. Tujuan utama dari *Arab Uprising* adalah untuk membentuk sistem politik yang lebih representatif dan memperbesar bentuk partisipasi masyarakat, mencapai sistem ekonomi yang lebih adil, dan sistem hukum yang independen tanpa dipengaruhi oleh kelompok elit tertentu (Hunter, 2013). Munculnya *Arab Uprising* diawali oleh adanya protes masyarakat Tunisia yang berdampak pada berakhirnya pemerintahan Presiden Zainal Abidin bin Ali pada tahun 2010. Keberhasilan masyarakat Tunisia dalam menghentikan pemerintahan autokrat Bin Ali memunculkan harapan untuk negara yang lebih demokratis dan lebih adil dalam menghadapi konflik. Hal tersebut menyebabkan munculnya banyak gerakan anti pemerintah yang bergabung untuk melawan pemerintah, seperti Libya dengan turunnya Muammar Qaddafi, Mesir dengan turunnya Husni Mubarak, serta Suriah dengan protes terhadap pemerintahan Bashar Al Assad (Hunter, 2013).

Salah satu protes yang berdampak besar adalah adanya protes di Suriah pada tahun 2011 yang dilakukan di Deraa. Protes tersebut dipelopori oleh protes-protes yang dilakukan negara lain. Akan tetapi, dalam menghadapi protes di Deraa, pemerintah Suriah menggunakan kekerasan sehingga protesnya menjadi melebar, yang mana kelompok-kelompok oposisi secara terang-terangan menunjukkan perlawanan (BBC, 2019). Dari situlah muncul konflik sipil Suriah. Lambat laun konflik Suriah tidak hanya berhenti dengan konflik antara masyarakat Suriah dengan pemerintah Suriah, melainkan banyak kelompok atau negara yang ikut campur untuk memenuhi agenda masing-masing. Hal tersebut menyebabkan konflik Suriah semakin sulit untuk diatasi, terlebih ketika aktor-aktor tersebut mengangkat isu perbedaan identitas di Suriah, yang mana Suriah didominasi oleh Sunni Islam, namun pemerintahannya dipimpin oleh Assad yang merupakan Syiah.

Gerakan anti pemerintah tersebut lambat laun berubah menjadi konflik etnis, region, bahkan sekte (Hunter, 2013). Konflik Suriah yang pada awalnya merupakan konflik internal antara masyarakat dan pemerintah Suriah kemudian menjadi *proxy war* dalam lingkup regional dan internasional, dimana aktor-aktor memanfaatkan perbedaan identitas Sunni dan Syiah di Suriah untuk kepentingan negara masing-masing (Balanche, 2018). Salah satunya adalah Arab Saudi yang turut serta dalam konflik Suriah untuk menyeimbangi pengaruh Iran yang juga turut andil dalam konflik tersebut, dimana Arab Saudi memberikan dukungan keras terhadap oposisi karena Arab Saudi menentang pemerintahan Syiah Assad, sedangkan Iran memberikan dukungan terhadap Assad sebagai sesama Syiah. Hal tersebut yang kemudian memelopori kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan konflik yang diikuti oleh Arab Saudi, bahkan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan kata lain, ketika

resolusi maupun kebijakan anggota tetap Dewan Keamanan dikeluarkan dan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan Arab Saudi, negara tersebut cenderung akan menentang.

Sikap Rusia dan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah

Rusia dan Suriah memiliki hubungan bilateral yang cukup erat sejak tahun 1947 dimana Suriah merupakan salah satu aliansi Rusia dalam melawan kekuatan barat pada masa Perang Dingin (Trenin, 2012). Kedekatan kedua negara tersebut ditandai dengan banyaknya bantuan dana maupun militer Rusia kepada Suriah terutama pada masa Revolusi Suriah pada tahun 1966. Kerjasama di antara keduanya juga terus berlangsung hingga pada tahun 2012, Suriah menempati 10% dari keseluruhan penjualan global Rusia di bidang persenjataan, dengan total dana \$1,5 milyar (Galpin, 2012). Selain itu, Rusia juga memberikan bantuan peralatan perang dan pelatihan militer pada Suriah mengenai penggunaan senjata buatan Rusia (Elder, 2012).

Selain bantuan dalam bidang militer, Rusia juga memberikan dukungan yang kuat terhadap Suriah dalam hal politik. Pada tahun 2011, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Portugal berusaha untuk memberi sanksi pada pemerintah Suriah melalui PBB, namun mendapat perlawanan yang kuat dari Rusia dan Tiongkok. Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, menyatakan bahwa Rusia menolak adanya campur tangan PBB pada konflik Suriah karena Rusia menilai situasi di Suriah bukan merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Sebaliknya, menurut Lavrov, Suriah merupakan negara yang penting di Timur Tengah dan destabilisasi Suriah akan memberi dampak yang buruk bagi negara tersebut dan region Timur Tengah (Meyer, Cook, & Arkhipov, 2011). Rusia, melalui Vitaly Churkin, Duta Besar Rusia untuk PBB, mengancam akan memberi veto jika PBB memberi sanksi pada Suriah dalam bentuk embargo persenjataan karena dengan adanya embargo akan menghambat penjualan senjata Rusia ke Suriah. Sebagai gantinya, Rusia memberi alternatif yang tidak melibatkan sanksi yaitu dengan mendorong Suriah untuk mempercepat proses reformasinya, walaupun alternatif tersebut mendapat banyak pertentangan dari negara lain.

Pada Agustus 2013, Amerika Serikat merencanakan akan melakukan serangan militer terhadap pemerintahan Suriah karena adanya penggunaan senjata kimia (Lewis, 2013). Akan tetapi, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama menyatakan akan menunda serangan tersebut dengan alasan menunggu persetujuan dari Kongres walaupun Obama juga beranggapan bahwa aksi militer terhadap Assad juga penting. Penundaan ini dianggap dramatis karena sebelumnya pada tahun 2011 Obama pernah melancarkan serangan militer terhadap

Libya tanpa persetujuan Kongres. Obama beranggapan bahwa aksi militer tersebut tidak memiliki konsekuensi apapun karena aksi militer tersebut hanya bertujuan untuk menteralkan ancaman senjata kimia dan penyebarannya. Amerika Serikat tidak pernah berniat untuk ikut campur lebih dalam pada konflik Suriah.

Setelah penundaan serangan militer tersebut, Amerika Serikat berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui jalan politik. Rusia memanfaatkan kondisi tersebut untuk menghentikan serangan Amerika Serikat, salah satunya dengan perjanjian untuk mendorong Suriah agar menempatkan persediaan senjata kimianya di bawah kontrol internasional (Gordon & Myers, 2013). Perjanjian tersebut menyatakan bahwa pemerintah Suriah harus menyerahkan persediaan persenjataannya, dan jika tidak, permasalahan tersebut akan diangkat ke PBB dengan ancaman penggunaan kekuatan militer dan sanksi. Secara spesifik, peralatan produksi persenjataan harus dihancurkan hingga November 2013, sedangkan untuk bahan dan peralatan senjata kimia harus dihilangkan sebelum pertengahan 2014 (BBC, 2013). Walaupun banyak yang menolak perjanjian tersebut karena dinilai memberi banyak waktu untuk rezim Assad dan menghilangkan prospek serangan udara terhadap Suriah (Urquhart, 2013). Akan tetapi di sisi lain negara-negara besar seperti Perancis dan Inggris memberikan dukungannya. Amerika Serikat sendiri melihat perjanjian tersebut sebagai salah satu cara untuk meletakkan persediaan senjata Suriah di bawah kontrol internasional. Jika Suriah tidak mengikuti rencana untuk menyerahkan persediaan senjatanya, serangan militer akan tetap dilakukan.

Dukungan Rusia yang kuat terhadap pemerintahan Assad menimbulkan penolakan dari Arab Saudi sebagai pendukung oposisi Assad. Selain itu, sikap Amerika Serikat yang cenderung tidak tegas terhadap pemerintah Suriah juga turut memancing penolakan. Rusia dan Amerika Serikat, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dinilai memanfaatkan jabatan dan haknya untuk mendukung pemerintahan Assad dan mencapai tujuannya. Di sisi lain, Arab Saudi berharap pemerintahan Assad segera berakhir namun resolusi yang ditujukan kepada pemerintahan Assad selalu ditolak oleh Rusia. Ketidaksukaan Arab Saudi terhadap sikap Rusia dan Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dalam konflik Suriah ini menimbulkan sentimen tersendiri pada Dewan Keamanan sebagai suatu badan yang bertugas untuk menjaga perdamaian internasional. Dewan Keamanan dinilai tidak efektif karena hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara anggota tetap saja.

Dalam kasus Suriah, Arab Saudi sudah beberapa kali menyatakan kekecewaannya pada Dewan Keamanan PBB, khususnya pada anggota tetap Amerika Serikat. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembatalan pidato Arab Saudi pada rapat PBB dan menolak keanggotaan Dewan Keamanan. Bahkan, Bandar bin Sultan, Ketua Intelijen Arab Saudi, secara terang-

terangan menyatakan bahwa Arab Saudi akan mengurangi kerjasama dengan Amerika Serikat (Amos, 2013), sebagai respon atas keputusan Amerika Serikat untuk menunda serangan udara ke Suriah. Kekecewaan Arab Saudi terhadap Amerika Serikat juga ditunjukkan dengan implementasi kebijakan-kebijakan yang tidak terlebih dahulu didiskusikan dengan Amerika Serikat, salah satunya adalah kebijakan untuk mendukung oposisi Suriah dalam Syrian Islamic Army (Amos, 2013). Dengan kata lain, Arab Saudi lebih fokus pada apa yang secara nyata terjadi di Suriah dibandingkan dengan negosiasi untuk mengakhiri konflik di Suriah.

Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam Konflik Israel-Palestina

Menilik hubungan bilateral Amerika Serikat dan Israel, Amerika Serikat merupakan pemberi bantuan luar negeri terbesar bagi Israel. Sejak 1985, Israel telah menerima sekitar \$3 milyar setiap tahunnya dalam hal bantuan dana militer dan ekonomi. Pada masa pemerintahan Bush tahun 2001-2005, Israel menerima bantuan dana militer sebesar \$10,5 milyar dan pemberian senjata sejumlah \$6,3 milyar (Berrigan & Hartung, 2006). Israel juga merupakan importir senjata terbesar dari Amerika Serikat, yang ditandai dengan pada tahun 1996-2005 Israel menghabiskan sejumlah \$10,19 milyar pada persenjataan dan peralatan militer dari Amerika Serikat (Berrigan & Hartung, 2006). Hampir seluruh peralatan perang yang dimiliki Israel merupakan bentuk bantuan dari Amerika Serikat. Dengan kata lain, Israel sangat bergantung pada bantuan dana dan militer dari Amerika Serikat pada konflik yang terjadi antara Israel dan negara-negara lain di sekitarnya.

Pada dasarnya tensi konflik antara Israel dan Palestina dapat diminimalisir jika Amerika Serikat mau mengurangi intensitas bantuan militer yang diberikan kepada Israel, yang mana bantuan-bantuan tersebut digunakan Israel untuk melakukan serangan terhadap Palestina. Amerika Serikat sendiri pada dasarnya juga dapat melakukan embargo terhadap Israel karena Israel dinilai telah melanggar beberapa hukum terkait humaniter pada pendudukan di wilayah Palestina. Akan tetapi, Amerika Serikat lebih memilih untuk memberikan bantuan militer, baik dalam bentuk finansial maupun persenjataan, kepada Israel dengan alasan untuk menjaga stabilitas Israel (Berrigan & Hartung, 2006). Bantuan Amerika Serikat kepada Israel, yang merupakan musuh bagi bangsa Arab, terus memicu pertentangan dari pihak Arab Saudi sebagai salah satu aliansi yang memiliki hubungan bilateral yang erat dengan Amerika Serikat. Arab Saudi beranggapan bahwa berhentinya bantuan Amerika Serikat kepada Israel secara tidak langsung akan meminimalisir konflik Israel-Palestina.

Mekanisme Veto dalam Dewan Keamanan PBB

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kelima negara anggota tetap memiliki hak veto yang terkadang dapat digunakan untuk mencapai tujuan masing-masing negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang kerap menggunakan hak vetonya untuk memberikan dukungan politik pada Israel. Hingga tahun 2011, Amerika Serikat sudah menggunakan hak vetonya di PBB sebanyak sepuluh kali untuk Israel, sembilan di antaranya mengenai konflik Israel-Palestina (Pilkington, 2011). Salah satunya adalah pada tahun 2006, dimana Qatar mensponsori draft resolusi mengenai tindakan militer Israel di Gaza dan menentang Palestina yang mengirimkan peledak dari Gaza. Resolusi tersebut menuntut Israel untuk menghentikan penyerangannya di Gaza dan membebaskan pemerintah Palestina yang tertangkap, serta meminta Palestina untuk membebaskan tentara Israel yang tertangkap dan menghentikan peluncuran roket dari Gaza ke Israel (CNN, 2006). Pada saat itu, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk memblokade resolusi tersebut dengan alasan bahwa resolusi tersebut bias terhadap Israel. Amerika Serikat pada saat itu menjadi satu-satunya yang memberikan veto ketika 10 negara lain mendukung dan 4 abstain.

Pada tahun 2011, Amerika Serikat sekali lagi menggunakan hak vetonya untuk menentang resolusi PBB mengenai penolakan pendudukan Israel di teritori Palestina (Pilkington, 2011). Sebanyak 14 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut. Amerika Serikat mendapat kritik pada penggunaan hak vetonya karena hal tersebut menunjukkan kelemahan Amerika Serikat dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah dan tindakannya bersifat kontradiktif dengan prinsip Amerika Serikat dalam menolak pendudukan terhadap teritori negara lain. Susan Rice, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB saat itu menjelaskan bahwa penyetujuan terhadap resolusi tersebut hanya akan memberatkan Israel dan Palestina, serta semakin menjauhkan keduanya dari kemungkinan negosiasi.

Selain Amerika Serikat, Rusia juga tercatat kerap menggunakan hak vetonya untuk masalah yang ada di Timur Tengah, khususnya Suriah. Tercatat pada tahun 2011-2013 Rusia menggunakan hak vetonya sebanyak tiga kali pada isu Suriah. Draft resolusi pertama pada 4 Oktober 2011 mengenai pelanggaran HAM berat dan ancaman sanksi terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad, kedua pada 4 Februari 2012 mengenai tuntutan agar kekerasan segera dihentikan serta pemberhentian pemerintahan Assad, dan ketiga pada 19 Juli 2012 mengenai ancaman sanksi jika pemerintah Suriah maupun oposisi tidak menghentikan penggunaan senjata dan kekerasan dalam bentuk apapun (McKirby, 2017). Tindakan Rusia dan Amerika Serikat sebagai anggota permanen Dewan Keamanan dalam menyalahgunakan haknya untuk memblokade resolusi-resolusi mengenai konflik tertentu dinilai mengurangi integritas dan efektivitas Dewan Keamanan dalam mempromosikan perdamaian dunia.

Faktor Lingkungan Domestik

Lingkungan domestik Arab Saudi didominasi oleh hukum Islam yang berpengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan Arab Saudi. Pada Artikel I Hukum Dasar Pemerintahan Arab Saudi, dinyatakan bahwa Arab Saudi merupakan negara Arab-Islam yang berdaulat yang konstitusinya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah (tradisi yang dilakukan oleh Nabi). Oleh karena itu, kondisi politik di Arab Saudi tidak lepas dari agama Islam sebagai pedoman hidup di negara tersebut yang lantas berpengaruh pada bagaimana pemerintah membuat kebijakan luar negeri (Matthiesen, 2015). Walaupun pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki, tindakan raja sebagai pemimpin masih dibatasi oleh hukum syariah dan tradisi (Haynes, 2007).

Terbentuknya Arab Saudi sendiri merupakan hasil dari aliansi jangka panjang antara Al Saud dan Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab yang merupakan pendiri Wahhabi. Kedekatan kedua aktor tersebut membentuk hubungan mutualisme yang ditunjukkan dengan dukungan terhadap kekuasaan satu sama lain. Al Saud mempertahankan otoritas Wahhabi dalam hal agama dan menyebarkan doktrin Wahhabi, sedangkan keluarga Al Wahhab mendukung otoritas politik Al Saud dengan menggunakan pandangan agamanya untuk melegitimasi kepemimpinan keluarga Al Saud (Bligh, 1985). Relasi di antara keduanya dimulai sejak abad ke-18 dimana Ash Sheikh dan Al Saud membawa pandangan Sunni Islam yang kuat ke wilayah Nejd—yang lalu berubah menjadi Kerajaan Saudi—dan Jazirah Arab. Interpretasi aliran Sunni terhadap Islam tersebut yang pada akhirnya dijadikan sebagai agama nasional di Arab Saudi.

Secara garis besar, identitas agama di Arab Saudi terbagi menjadi dua yaitu Sunni dan Syiah. Ekstremis Sunni mengklaim bahwa Syiah bukan merupakan Muslim yang sebenarnya. Hal tersebut lambat laun meluas ke kalangan Sunni hingga timbul pandangan yang kuat terhadap perbedaan sekte, dimana 40% masyarakat Sunni tidak menerima Syiah sebagai Muslim dan menganggap Syiah sebagai “*the other*”. Munculnya konsep “*the other*” menyebabkan Arab Saudi mengadopsi pandangan anti-Syiah. Sentimen anti-Syiah tersebut membuat pemerintah Arab Saudi memperkuat peran ulama dalam pemerintahan dan mempromosikan *image* Sunni konservatif. Selain itu, Arab Saudi juga menerapkan aturan Wahhabi yang lebih ketat dan memberikan ulama lebih banyak kontrol terhadap sektor sosial dan agama. Hal itu menyebabkan Arab Saudi tidak hanya terikat pada agama Islam, melainkan pada pendekatan Sunni yang menolak simbol-simbol Syiah (May, 2014). Permasalahan sekte ini bahkan diangkat hingga ke tingkat perumusan kebijakan luar negeri. Sunni bukan lagi dilihat sebagai sekte atau sumber legitimasi, melainkan sebagai komponen dari identitas nasional Arab Saudi yang mengatur kepemimpinan Al Saud di negara dan kawasan tersebut,

serta membedakan Arab Saudi dengan Negara Islam (IS). Selain itu, Arab Saudi juga menggunakan pandangan Sunni untuk mendukung kebijakannya dalam memenuhi ambisi regional, terutama dalam persaingannya dengan negara-negara Arab di sekitarnya (Matthiesen, 2015).

Adanya sentimen terhadap kelompok Syiah berpengaruh terhadap bagaimana Arab Saudi menentukan kebijakan luar negerinya, khususnya di kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah pada hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Iran. Ketegangan antara Sunni dan Syiah serta perbedaan ideologi merupakan faktor penting dalam hubungan Arab Saudi dan Iran yang lantas membentuk kebijakan dan tindakan kedua negara tersebut di Timur Tengah, walaupun pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa konflik antara Arab Saudi dan Iran bukan didasarkan pada perbedaan sekte, melainkan karena kebijakan dan ambisi regional dari Iran (Wehrey et.al., 2009). Persaingan antara Arab Saudi dan Iran dapat dilihat sebagai usaha *balance of power*, dengan sektarianisme sebagai salah satu komponennya yang dominan. Berkembangnya dominasi Iran dan semakin kuatnya Syiah Irak pasca intervensi Amerika Serikat pada tahun 2003 dikhawatirkan akan memicu perkembangan otoritas politik Syiah ke wilayah lain dan menyebabkan “Shia Crescent” yang membentang dari Damaskus hingga Tehran (Nasr, 2006). Propaganda Wahhabi, seperti yang dilakukan Arab Saudi pada masa Revolusi Iran tahun 1979, dianggap tidak dapat lagi digunakan untuk melawan dominasi Iran.

Posisi Arab Saudi menjadi terancam dari berbagai sisi karena organisasi maupun negara dengan mayoritas Syiah semakin kuat posisinya, serta banyaknya protes dari kelompok Syiah di dalam Arab Saudi sendiri untuk reformasi. Pasca 2003, sudah tidak ada lagi negara besar dengan mayoritas Syiah yang bisa bekerja sama dengan Arab Saudi untuk mengontrol perkembangan Syiah di region Timur Tengah. Isu sektarianisme lantas ini digunakan untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dari negara atau kelompok dengan aliran yang sama, yang kemudian dieksploitasi dan dipolitisasi untuk tujuan nasional Arab Saudi dan Iran sendiri (Oraby, 2018). Adanya isu sektarianisme menyebabkan Arab Saudi terobsesi untuk mengimbangi perkembangan kekuatan Iran di Timur Tengah. Hal itu membuat Arab Saudi ikut campur pada berbagai isu, khususnya di Timur Tengah, yang dinilai dapat berpengaruh besar terhadap kepemimpinannya di region tersebut. Salah satunya adalah partisipasi Arab Saudi secara tidak langsung pada konflik Suriah.

Isu sektarianisme menjadi dominan dalam perumusan kebijakan luar negeri Arab Saudi. Persaingan Arab Saudi dan Iran tidak berhenti hanya pada hubungan bilateral kedua negara tersebut melainkan meluas hingga isu-isu lain dimana kedua negara tersebut saling berkaitan. Isu mengenai Timur Tengah yang muncul dalam organisasi seperti PBB seolah

hanya menjad sarana persaingan antara Arab Saudi dan Iran. Oleh karena itu, Arab Saudi memiliki ekspektasi bahwa badan tersebut dapat mengakomodasi kepentingannya untuk mengimbangi kekuatan regional Iran di Timur Tengah sehingga segala bentuk resolusi maupun kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada Arab Saudi akan dipandang secara negatif. Hal ini yang membuat Arab Saudi memiliki sentimen buruk terhadap Dewan Keamanan PBB yang beberapa kebijakannya atas Timur Tengah dinilai bertentangan dengan kebijakan luar negeri Arab Saudi, salah satunya adalah pada isu Suriah yang mana banyak draft resolusi yang tidak lolos mengenai penurunan pemerintahan Assad.

Simpulan

Keputusan Arab Saudi untuk mengundurkan diri dari keanggotaan tidak tetapnya pada Dewan Keamanan PBB pada dasarnya diawali dari adanya *Arab Uprising* yang kemudian memelopori terjadinya konflik Suriah. Adanya konflik Suriah membuat Arab Saudi memiliki kepentingan untuk memperbesar pengaruhnya di kawasan Timur Tengah sebagai penyeimbang pengaruh Iran yang merupakan pendukung pemerintahan Bashar Al Assad. Segala cara dilakukan oleh Arab Saudi untuk memberikan dukungan pada kelompok oposisi Assad, sehingga kebijakan apapun yang tidak sejalan dengan kepentingan Arab Saudi akan diabaikan, salah satunya adalah bergabungnya Arab Saudi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Bergabungnya Arab Saudi dinilai tidak memberikan efek yang signifikan karena mekanisme kerja Dewan Keamanan tidak dapat mengakomodasi kepentingan Arab Saudi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penggunaan hak veto yang dilakukan oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Rusia dan Amerika Serikat, untuk kepentingan masing-masing yang kebetulan bertolak belakang dengan arah kebijakan Arab Saudi.

Daftar Pustaka

Artikel Daring

Amos, Deborah. 2013. "Why Is Saudi Arabia Bickering With The U.S.?", *National Public Radio*, diakses pada 10 April 2019,

[<https://www.npr.org/sections/parallels/2013/10/23/240163075/why-is-saudi-arabia-bickering-with-the-u-s>].

BBC. 2013. "US and Russia agree Syria chemical weapons deal", *BBC News*, diakses pada 9 April 2019, [<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24091633>].

BBC. 2019. "Why is there a war in Syria?", BBC, diakses pada 26 Juni 2019, [<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229>].

CNN. 2006. "U.S. vetoes U.N. resolution on Mideast: U.N. diplomatic team heads to 'major crisis'", *CNN*, diakses pada 15 Mei 2019, [<https://www.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/13/mideast,response/index.html>].

Elder, Miriam. 2012. "Syria will receive attack helicopters from Russia, Kremlin confirms", *The Guardian*, diakses pada 14 Mei 2019, [<https://www.theguardian.com/world/2012/jun/28/syria-receive-attack-helicopter-russia?newsfeed=true>].

Galpin, Richard. 2012. "Russian arms shipments bolster Syria's embattled Assad", *BBC News*, diakses pada 14 Mei 2019, [<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-16797818>].

Gordon, Michael R. & Myers Steven L. 2013. "Obama Calls Russia Offer on Syria Possible 'Breakthrough'", *The New York Times*, diakses pada 14 Mei 2019, [<https://www.nytimes.com/2013/09/10/world/middleeast/kerry-says-syria-should-hand-over-all-chemical-arms.html?pagewanted=all>].

Hunter, Shireen T. 2013. "Ideas and Movement behind the Arab Spring", *Iran Review*, diakses pada 26 Juni 2019, [www.iranreview.org/content/Documents/Ideas-and-Movements-behind-the-Arab-Spring.htm].

Lewis, Paul. 2013. "US attack on Syria delayed after surprise U-turn from Obama", *The Guardian*, diakses pada 9 April 2019,

[<https://www.theguardian.com/world/2013/aug/31/syrian-air-strikes-obama-congress>].

McKirdy, Euan. 2017. "8 times Russia blocked a UN Security Council resolution on Syria", *CNN*, diakses pada 10 April 2019, [<https://edition-m.cnn.com/2017/04/13/middleeast/russia-unsc-syria-resolutions/index.html>].

Meyer, Henry; Cook, Brad; Arkhipov, Ilya. 2011. "Russia Warns U.S., EU Not to Aid Syria Protests After Libya", *Bloomberg*, diakses pada 14 Mei 2019, [<https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-06-01/russia-warns-u-s-nato-against-military-aid-to-syria-protests-after-libya>].

Middle East Policy Council. 2013. "Saudis Reject UN Security Council Seat", diakses pada 8 April 2019, [<https://mepc.org/commentary/saudis-reject-un-security-council-seat>].

Oraby, Farah. 2018. "Saudi Arabia and Iran's Rivalry: Politics Under the Veil of "Deep-Rooted Sectarianism", *Berkeley Political Review*, diakses pada 16 Mei 2019, [<https://bpr.berkeley.edu/2018/09/03/saudi-arabia-and-irans-rivalry-politics-under-the-veil-of-deep-rooted-sectarianism/>]

Pilkington, Ed. 2011. "US vetoes UN condemnation of Israeli settlements", *The Guardian*, diakses 15 Mei 2019, [<https://www.theguardian.com/world/2011/feb/19/us-veto-israel-settlement>].

United Nations. 2013. "Letter dated 12 November 2013 from the Permanent Representative of Arab Saudi to the United Nations addressed to the Secretary-General". [PDF]. Diunduh di [http://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/68/599]

Urquhart, Conal. 2013. "Syria crisis: US and Russia agree chemical weapons deal", *The Guardian*, diakses pada 10 April 2019, [<https://www.theguardian.com/world/2013/sep/14/syria-crisis-us-russia-chemical-weapons-deal>].

Worth, Robert F. 2013. "Arab Saudi Rejects U.N. Security Council Seat in Protest Move", *The New York Times*, diakses pada 19 Agustus 2017, [<https://nytimes.com/2013/10/19/world/middleeast/saudi-arabia-rejects-security-council-seat.html>].

Buku / Jurnal

Balanche, Fabrice. 2018. *Sectarianism in Syria's Civil War*. Washington: The Washington Institute for Near East Policy.

Berrigan, Frida & Hartung, William D. 2006. "U.S. Military Assistance and Arms Transfers to Israel: U.S. Aid, Companies Fuel Israeli Military", *World Policy Institute Issue Brief*, hlm. 1-7.

Bligh, Alexander. 1985. "The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 17, No.1, hlm. 37-50.

Hagan, J.D. 1993. *Political Opposition and Foreign Policy in Comparative Perspective*. Boulder: Lynne Rienner..

Haynes, J. 2007. *Introduction to International Relations and Religion*. Essex: Pearson Education Limited.

Matthiesen, Toby. 2015. "The domestic sources of Saudi foreign policy: Islamist and the state in the wake of the Arab Uprisings", *Rethinking Political Islam*, hlm. 1-12.

May, Darwich. 2014. "The Ontological (In)security of Similarity: Wahhabism versus Islamism in Saudi Foreign Policy", *GIGA Working Papers*, No. 263, hlm. 4-26.

Nasr, Vali. 2006. *The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future*. New York: W.W. Norton & Company.

Wehrey, Frederic et al. 2009. "Sectarianism and Ideology in the Saudi-Iranian Relationship",
Saudi-Iranian Relations Since the Fall of Saddam. CA: RAND Corporation, hlm. 11-
43.